

**PENGARUH PENDAYAGUNAAN DANA ZIS
DAN PDRB PER KAPITA TERHADAP
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
(Studi Kasus di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2006-2009)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**RIA MARGININGSIH
NIM. C2B607050**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

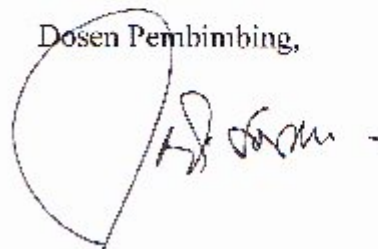
Nama Penyusun : Ria Marginingsih
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607050
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP

Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAYAGUNAAN DANA
ZIS DAN PDRB PER KAPITA TERHADAP
JUMLAH PENDUDUK MISKIN**

Dosen Pembimbing : Dr. H. Hadi Sasana, SE., Msi.

Semarang, Desember 2011

Dosen Pembimbing,



(Dr. H. Hadi Sasana, SE., Msi.)

NIP. 19690121997021001


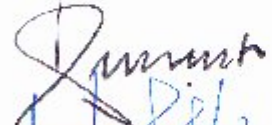

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Ria Marginingsih
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607050
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP
Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAYAGUNAAN DANA
ZIS DAN PDRB PER KAPITA TERHADAP
JUMLAH PENDUDUK MISKIN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

Tim Penguji:

1. Dr. H. Hadi Sasana, SE., Msi.
2. Drs. H Edy Yusuf AG, MSc. Ph. D.
3. Nenik Woyanti, SE., Msi.

()
()
()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Ria Marginingsih, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH PENDAYAGUNAAN DANA ZIS DAN PDRB PER KAPITA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Desember 2011

Yang membuat pernyataan,



(Ria Marginingsih)
NIM: C2B607050

ABSTRACT

Still large number of poor in the province of Central Java indicate that the level of welfare is still low. Still large number of poor people in Central Java caused by the distribution of uneven economic development. The purpose of this study was to determine the effect of actual Utilization of funds ZIS, Actual Government expenditure for people's welfare and GDP per capita of population poor in Central Java.

This study uses secondary data over the period 2006-2009 times series and cross section data throughout the county / city of Central Java province with analysis tools Fixed Effect Model (FEM) or the Least Square Dummy Variable (LSDV).

The results of this study indicate that the utilization of funds ZIS realization, the realization of government spending for People's Welfare and GDP per capita is negative and significant effect on the number of poor people. Direction of the negative regression coefficient indicates that the increased utilization of funds ZIS and GDP per capita will decrease the amount of poverty.

Key words: poverty, number of poor people, zakat, infak, sedekah GDP per capita, Central Java

ABSTRAK

Masih besarnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah disebabkan oleh distribusi pembangunan ekonomi yang tidak merata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh realisasi pendayagunaan dana ZIS, realisasi pengeluaran pemerintah bidang kesra dan PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder *times series* selama periode 2006-2009 dan data *cross section* seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dengan alat analisis *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi pendayagunaan dana ZIS, realisasi pengeluaran pemerintah bidang kesra dan PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Arah koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa peningkatan pendayagunaan dana ZIS dan PDRB per kapita akan menurunkan jumlah angka kemiskinan.

Kata kunci: kemiskinan, jumlah penduduk miskin, zakat, infak, sedekah, PDRB per kapita, Jawa Tengah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ingallah,
kepedihan kita hari ini akan terasa indah dan manis saat kita
mengingatnya kelak.

<http://www.pozlmo.com>

Banyak hal mungkin menghampiri orang-orang yang menunggu,
Tapi hanya hal-hal yang ditinggalkan oleh
Orang-orang yang gesit
(Abraham Linchon)

Semoga,
setiap kata dalam penulisan ini
menjadi amal kebaikan bagimu

Ayah, Ibu dan

Guru-guruku.

Aamiin

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T karena atas rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Dana ZIS dan PDRB per Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin”, sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tak lepas dari dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si,Akt.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Drs. H. Waridin, MS., Ph.D selaku dosen wali dan seluruh dosen jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas semua ilmu pengetahuan dan nasehat yang telah diberikan.
4. Bapak Dr. H. Hadi Sasana, SE., Msi. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, serta dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan kepada penulis selama proses penelitian ini.

5. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas bantuan yang diberikan.
6. Ibu Gadis, Mbak Nur, Mbak Linda dan segenap staf Dinas Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Jawa Tengah atas bantuan yang diberikan.
7. Kedua orang tua, Ayah Karyono dan Ibu Reni terimakasih banyak atas doa, kasih sayang, serta dorongan semangat yang telah diberikan.
8. Kakak, adik dan ketiga ponakanku, Isbani, Marwati, Triyaeni, Happy, Fahri dan Zian terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan.
9. Sahabat-sahabatku Ayu Wafi, Yeni Darmawati, Suwanti, Annisa, Selvia, Diah Rahmaditha, Nur Ilham, Arjanggal, Elsha Betha, Whisnu Adhi, Zulham, Sukma, Pungky terimakasih atas doa dan perhatian kalian.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan IESP 2007 Merna, Faiz, Mb Betty, Hasya, Nitha, Lifta dan semuanya terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama empat tahun ini.
11. Sahabat-sahabat di IAIN Walisongo Mbak Yeni Ulfie, Mbak Indra, Mbak Helin, Atik terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.
12. Kepada pihak-pihak yang terkait yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung atas penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Desember 2011

Penulis,

Ria Marginingsih

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1.3.1 Tujuan	14
1.3.2 Manfaat	15
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II TELAAH PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Kemiskinan.....	17
2.1.1.1 Penyebab Kemiskinan	19
2.1.1.2 Ukuran Kemiskinan	23
2.1.2 Zakat Sebagai Alat Pengentas Kemiskinan.....	26
2.1.2.1 Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah	30
2.1.2.2 Objek Zakat	36
2.1.2.3 Zakat dan Rukun Zakat	39

	Halaman
2.1.3 Produk Domestik Reginal Bruto	40
2.1.4.1 Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Kemiskinan	41
2.1.4.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan	44
2.1.4 Penelitian Terdahulu	45
2.1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis	50
2.1.6 Hipotesis Penelitian	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	51
3.1.1 Variabel Penelitian	51
3.1.2 Definisi Operasional	51
3.2 Populasi dan Sampel	52
3.3 Jenis dan Sumber Data	53
3.4 Metode Pengumpulan Data	54
3.5 Metode Analisis.....	55
3.5.1 Metode Analisis Data Panel	55
3.6 Estimasi Model	59
3.7 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik	63
3.7.1 Uji Multikolinearitas	64
3.7.2 Uji Autokorelasi	65
3.7.3 Uji Heteroskedastisitas	65
3.7.4 Uji Statistik	66
3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi	66
3.7.4.2 Uji Signifikansi Simultan	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	69
4.1.1 Letak Geografis dan Pemerintahan	69
4.1.2 Luas dan Pembagian Wilayah	70
4.1.3 Jumlah Penduduk Miskin	71

	Halaman
4.1.4 Perkembangan PDRB per Kapita Provinsi	
Jawa Tengah	74
4.1.5 Zakat, Infak dan Sedekah	76
4.2 Analisis Data	78
4.2.1 Uji Asumsi Klasik	80
4.2.1.1 Deteksi Multikolinearitas	80
4.2.1.2 Deteksi Heteroskedastisitas	81
4.2.1.3 Deteksi Autokorelasi	82
4.2.2 Hasil Uji Statistik	83
4.2.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	83
4.2.2.2 Pengujian Secara Serentak (uji F)	83
4.2.2.3 Uji Parsial (uji t)	84
4.3 Interpretasi Hasil dan Pembahasan	85
4.3.1 Pengaruh Realisasi Pendayagunaan Dana ZIS	
Terhadap Jumlah Penduduk Miskin	86
4.3.2 Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap	
Jumlah Penduduk Miskin	89
4.3.3 Dummy Variabel	89
BAB V PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	92
5.3 Keterbatasan	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Realisasi Pendayagunaan Dana ZIS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009.....	11
Tabel 1.1	Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Berdasarkan Provinsi Tahun 2006-2009	13
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	47
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009	72
Tabel 4.2	PDRB per Kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009	75
Tabel 4.3	Realisasi Pendayagunaan Dana ZIS di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009	77
Tabel 4.5	Hasil Regresi Utama	79
Tabel 4.6	Hasil <i>Auxiliary Regression</i> Pengaruh Pendayagunaan Dana ZIS dan PDRB per Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009	80
Tabel 4.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Penyebaran Agama di Indonesia	4
Gambar 1.2 Pemetaan Muzakki, Mustahik, dan Potensi Wilayah di Indonesia	7
Gambar 1.3 Jumlah Total PDRB per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009	12
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	50

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data	98
Lampiran 2 Hasil <i>Regression</i>	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sampai saat ini masih dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Masalah kemiskinan yang dihadapi negara-negara ini biasanya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan dan pada akhirnya meningkat menjadi ketimpangan. Dalam banyak kasus kemiskinan diawali dari kurangnya akses tenaga kerja produktif terhadap lapangan pekerjaan yang tersedia.

Di Indonesia kemiskinan merupakan suatu ancaman yang telah ada sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini berdiri. Terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 semakin memperparah kondisi kemiskinan yang telah ada sebelumnya. Sejak tahun ini krisis menjadi pintu gerbang dari segala permasalahan. Dalam perkembangannya krisis yang terjadi akhirnya membawa dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Inflansi yang melonjak ke tingkat yang lebih tinggi, pengaruhnya adalah harga-harga kebutuhan pokok menjadi proporsional terhadap inflansi yang sedang terjadi. Pada akhirnya harga tersebut melebihi batas kemampuan daya beli sebagian masyarakat Indonesia. Dari sinilah angka kemiskinan di Indonesia semakin membengkak.

Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia sangat fluktuatif. Pada tahun 1976 angka kemiskinan Indonesia berkisar 40% dari jumlah penduduk, tahun 1996 angka kemiskinan turun menjadi 11% dari total

penduduk. Pada saat krisis moneter tahun 1997/1998 penduduk miskin Indonesia mencapai 24%. Tahun 2002 mengalami penurunan menjadi 18% dari total penduduk, angka kemiskinan pada tahun 2003 sebesar 17,4%, pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 14%. Akan tetapi angka resmi BPS berdasarkan sensus kemiskinan tahun 2005 mencapai 35,1 juta jiwa atau 14,6% dari jumlah penduduk. Susenas BPS 2006 mencatat penduduk miskin Indonesia mencapai 39,05 juta jiwa. Sementara itu bank dunia (*World Bank*) menyatakan bahwa, angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2004 mencapai 120 juta jiwa dengan asumsi penduduk yang hidup di bawah dua dolar sehari (Casmi, 2008).

Para ahli ekonomi mengelompokkan ukuran kemiskinan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut, diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, permukiman, kesehatan, dan pendidikan. Ukuran ini terkait dengan batasan pada kebutuhan pokok atau kebutuhan minimum. Sajogyo (1977) dalam Murjana (2008) menyatakan bahwa untuk daerah perkotaan kebutuhan minimal per kapita setara dengan 420 kg beras per tahunnya, dan untuk daerah perdesaan 320 kg beras. Kemiskinan relatif berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan. Dalam kemiskinan relatif, seseorang yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya belum tentu disebut tidak miskin, karena apabila dibandingkan dengan penduduk sekitarnya memiliki pendapatan yang lebih rendah.

Sach (2005) dalam Syahrul (2009) menyatakan bahwa situasi kemiskinan ekstrem ditandai oleh tiadanya enam modal (*capital*), yaitu: (1) *business capital*,

(2) *human capital*, (3) *infrastructure capital*, (4) *natural capital*, (5) *knowledge capital*, dan (6) *public institutional capital*. Ketiadaan enam modal inilah yang membuat orang miskin terperangkap dalam jebakan kemiskinan.

Jebakan kemiskinan yang membelenggu merupakan masalah kontemporer yang hingga saat ini masih terjadi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Menurut Mas'udi (2005), kegagalan menemukan konsep dan tatanan kehidupan yang adil, telah membuat ketimpangan hidup dan ketidakadilan sosial antara yang mampu (*the haves*) dan yang tidak mampu (*the have-not*) mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Bahkan, ada indikasi yang sangat mencolok bahwa ketimpangan dan keadilan itu menjadi pilihan sadar oleh si kuat untuk semakin meminggirkan mereka yang lemah. Dimulai dari ketidakadilan sosial di bidang ekonomi, kemudian menjalar cepat ke bidang politik, hukum, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, harkat dan martabat kemanusiaan pada level personal pun ikut menjadi tumbal. Proses dehumanisasi universal inilah yang menjadi sisi gelap dari peradaban manusia modern dewasa ini.

Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah menggulirkan berbagai bantuan atau insentif berupa dana maupun program, seperti program Penanggulangan Kemiskinan dan Perkotaan (P2KP), Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin), Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan bantuan lain. Namun demikian, upaya tersebut tidak dapat memberikan dampak yang berarti, karena insentif seperti BLT hanya bersifat konsumtif dan sebagai kenikmatan sesaat sehingga

akan mengakibatkan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan, padahal harapan dari adanya program tersebut tidaklah demikian.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia. Kenyataan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1



Sumber: Wikipedia, 2010

Jika dilihat dari Gambar 1.1 sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam. Sebaran warna hijau pada peta tersebut menunjukkan penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Dalam Islam dikenal beberapa bentuk insentif bagi perekonomian yang sangat unik bagi masyarakat miskin, yaitu zakat, infak dan sedekah. Zakat bersifat wajib sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela. Keduanya berperan dalam mencapai perekonomian yang berkeadilan. Sedangkan dalam fiskal konvensional, pajak hingga kini masih menjadi tulang punggung APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam menghadapi pengeluaran negara, termasuk dalam

mengatasi masalah kemiskinan. Keduanya, pajak dan zakat merupakan dua ujung tombak pemerataan pendapatan yang selama ini berjalan di Indonesia (Sofyan, 2007).

Islam memiliki perhatian yang besar terhadap kemiskinan. Fakir miskin mendapatkan prioritas utama dalam pembagian zakat. Selain itu, masalah kemiskinan juga menjadi perhatian al-Quran, surat adz-Dzariat ayat 19 menyatakan.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak mendapat bagian.”

Ayat lain menyebutkan bahwa kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan shalat. Dalam al-Quran, tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah shalat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus. Diantaranya dalam surat al- Baqoroh: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang orang yang ruku.”

Dari pengertian ayat di atas (surat al-Baqarah : 43), Allah memerintahkan kepada penduduk muslim untuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat. Perintah tersebut dituangkan dengan jelas dalam rukun Islam, yang mana shalat

sebagai rukun Islam yang kedua sedangkan zakat sebagai rukun Islam yang ketiga.

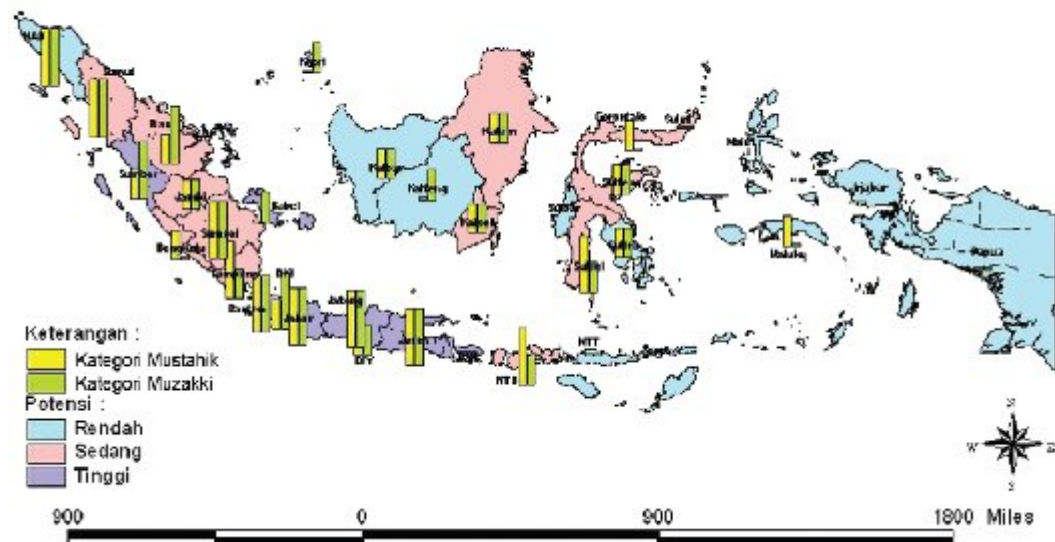
Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah adanya dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Menurut Harian Republika (2008) dalam M. Soekarni dkk (2009) berdasarkan hasil pengkajian Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, potensi zakat di Indonesia diestimasi mencapai 19,3 triliun rupiah. Jumlah tersebut akan terus membengkak bila ditambah dengan potensi zakat dari BUMN-BUMN yang jumlahnya setara hingga mencapai 38 triliun rupiah. Sedangkan, berdasarkan hasil penelitian *Public Interst Research and Advocacy Center (PIRAC)*, potensi zakat per tahun di Indonesia sebesar 20 triliun rupiah. Namun, realisasi penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun hanya berkisar 800 miliar rupiah hingga 1,2 triliun rupiah. Kenyataan ini menunjukkan sangat timpangnya realisasi penghimpunan zakat dari potensi sebenarnya.

Menurut Qardawi (2002) ada beberapa cara penanggulangan kemiskinan, *pertama* adalah dengan bekerja. Jadi dana zakat dijadikan suatu modal untuk menciptakan industri maka akan tertampung sejumlah *mustahik* (penerima zakat) untuk bekerja. *Kedua* adalah jaminan sanak famili, *ketiga* adalah jaminan negara.

Cara *keempat* dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui zakat. Jadi, zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, disamping sebagai ibadah dan bukti dari ketundukan seseorang kepada Allah, zakat juga mempunyai fungsi sosial yang sangat besar disamping merupakan satu tonggak perekonomian Islam. Gambar peta 1.2 merupakan bukti nyata dari kemiskinan yang terjadi di negeri ini.

Gambar 1.2
Pemetaan Muzakki, Mustahik dan Potensi Wilayah di Indonesia



Sumber: Dompot Dhuafa, 2010

Pada Gambar 1.2 kondisi *mustahik* (penerima zakat) dan *muzakki* (pemberi zakat) ditunjukkan dengan grafik batang, semakin tinggi bar *chart*-nya maka semakin banyak jumlah *mustahik* dan *muzakkinya*. Oleh karena itu daerah-daerah minoritas Islam seperti Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT) bar *chart*-nya juga rendah. Sedangkan potensi wilayah juga dibagi dalam tiga kategori rendah, sedang, tinggi. Dalam Gambar 1.2 ditunjukkan dengan warna dasar peta wilayah yaitu biru untuk potensi rendah, merah untuk potensi sedang dan ungu untuk potensi tinggi.

Gambar 1.2 terlihat bahwa Pulau Jawa memiliki potensi yang tinggi untuk semua Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa baik infrastruktur maupun ketersediaan lembaga keuangan di wilayah sangat tinggi ketersediaannya dibandingkan dengan Provinsi-provinsi lainnya. Namun, jumlah *mustahiknya*, dalam hal ini jumlah orang miskin, juga sangat banyak. Hal ini mungkin berkaitan dengan banyaknya jumlah penduduk di wilayah ini dan tingginya persentase umat Islam di wilayah ini.

Pada tahun 2000 beberapa negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia menandatangani deklarasi milenium yang menunjukkan komitmen bangsa-bangsa tersebut untuk mencapai delapan sasaran pembangunan milenium (*Millenium Development Goals-MDGs*) dimana salah satu pointnya adalah pengentasan kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya masalah kemiskinan untuk diatasi sehingga taraf kehidupan rakyat menjadi lebih berkualitas (Widiastuti, 2010).

Dukungan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pencapaian MDG's seperti yang disampaikan dalam Lokakarya di Wonosobo tahun 2007 membahas permasalahan mengenai faktor-faktor yang dinggap sebagai penyumbang angka kemiskinan. *Pertama*, Strategi penanggulangan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, perlindungan sosial serta kemitraan regional dan antar daerah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan.

Kedua, pembangunan pendidikan di Jawa Tengah dilakukan melalui upaya pengembangan dan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan

Iptek (Ilmu pengetahuan dan teknologi) dan pasar kerja. *Ketiga*, upaya untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan pemberdayaan perempuan dilakukan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan. *Keempat*, angka kematian bayi mendapat perhatian secara khusus melalui berbagai program dan kegiatan untuk menekan terjadinya gizi buruk pada balita.

Kelima, untuk memerangi merebaknya HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya dilakukan dengan mengintegrasikan lintas sektor, mempercepat pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kelompok resiko tertular. *Keenam*, cakupan pelayanan air bersih perkotaan kurang lebih 39,86% dan perdesaan 12,6%. *Ketujuh*, cakupan sanitasi kurang lebih 7,2% dan persampahan kurang lebih 71% sampah terangkut. *Kedelapan*, kerjasama sinergitas pengelolaan potensi yang merupakan tantangan pembangunan wilayah ke depan secara konsisten terus dilaksanakan (Bappeda, 2007).

Arah kebijakan pokok penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2007 dilaksanakan melalui program *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-growht* yang berorientasi pada pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah ditempuh melalui dua langkah strategis, yaitu *pertama* Pengurangan Pengeluaran, melalui: 1) Bidang pendidikan, diantaranya BOS (Bantuan Operasional Sekolah), bantuan khusus murid dan bantuan beasiswa keluarga miskin. 2) Bidang kesehatan dan KB, yaitu dengan penanggulangan gizi buruk dan gizi kurang, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD),

Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) dan bantuan alat kontrasepsi.

Kedua Peningkatan Pendapatan, melalui: 1) Bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, yaitu dengan pengembangan wirausaha, pengembangan pendidikan dan pelatihan wirausaha serta pemberdayaan usaha skala mikro. 2) Bidang sosial, melalui bantuan modal usaha bagi Penduduk miskin. 3) Bidang ketenagakerjaan, melalui perluasan kesempatan kerja dan berusaha, transmigrasi serta pelatihan ketrampilan tenaga kerja. 4) Bidang perumahan dan pemukiman, melalui pemugaran rumah kumuh dan padat di perkotaan, korban bencana alam dan penyediaan air bersih serta pembangunan sanitasi (Bappeda, 2007).

Berkaitan dengan usaha pengentasan kemiskinan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memperhatikan peranan pendayagunaan dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Jawa Tengah. Pendayagunaan dana ZIS mempunyai dua sifat, yaitu bersifat santunan dan bersifat bantuan. Bersifat santunan artinya pendistribusian dana yang diberikan untuk kepentingan dan kegiatan konsumtif. Sedangkan bersifat bantuan berarti pendistribusian dana tersebut diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya umat dengan kegiatan produktif, harapannya dana yang diberikan kepada *mustahik* (penerima zakat) dapat memerangi masalah kemiskinan yang diakibatkan ketidakpemilikan sumber daya modal yang memadai.

Tabel 1.1 merupakan realisasi pendayagunaan dana ZIS BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2006 sampai tahun 2009.

Tabel 1.1
Realisasi Pendayagunaan Dana ZIS
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2006-2009

Tahun	Total Pendayagunaan	Persentase
2006	14.972.647.030	-
2007	20.188.390.545	0,35%
2008	115.157.243.181	4,70%
2009	118.364.546.631	0,03%

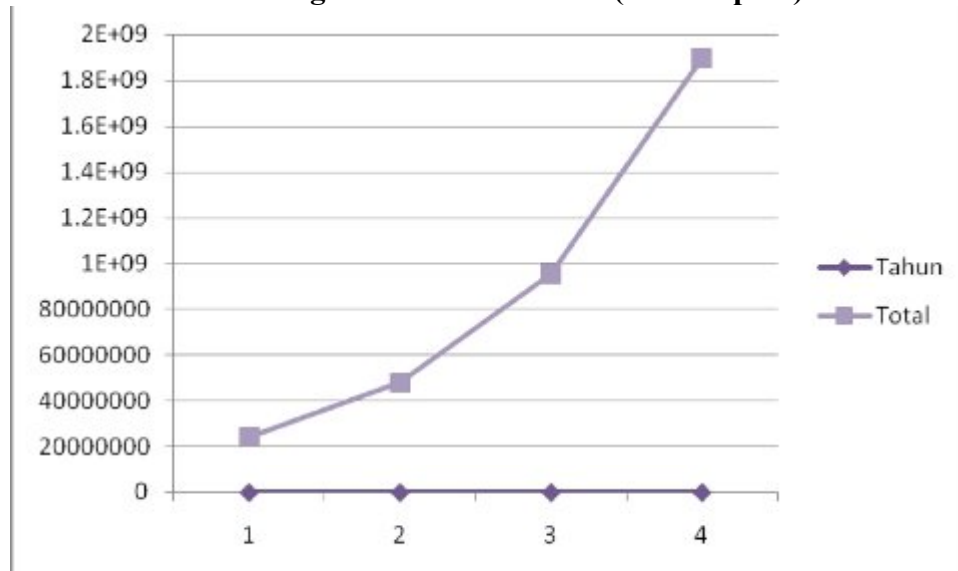
Sumber: Bazda (2006-2009), diolah

Tabel 1.1 merupakan jumlah pendayagunaan dana ZIS dari tahun 2006 sampai tahun 2009. Jika dilihat dari tahun ke tahun angka pertumbuhan pendayagunaan dana ZIS yaitu sebesar 0,35% pada tahun 2007, dan meningkat pada tahun 2008 sebesar 4,70%, sedangkan pada tahun 2009 persentase kenaikan anggaran pendayagunaan dana ZIS mengalami penurunan sebesar 0,03%.

Berdasarkan publikasi data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Provinsi Pulau Jawa tahun 2009 terdapat dua Provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan nasional (4,55%), yaitu Provinsi Jawa Barat dan DI Yogyakarta, yaitu sebesar 4,29% dan 4,39%. Sedangkan empat Provinsi lainnya termasuk Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan nasional.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan yang terjadi di Jawa Tengah dapat dilihat dalam Gambar 1.3.

Gambar 1.3
Jumlah Total PDRB per Kapita Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2006-2009 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS (2010), diolah

Dari Gambar 1.3 tingkat kenaikan PDRB per kapita ditunjukkan oleh grafik yang berwarna ungu dengan tingkat kenaikan rata-rata sebesar 893.430.041,88 rupiah, sedangkan garis horizontal pada sisi bawah grafik lamanya waktu penelitian yaitu periode tahun 2006-2009. Mengingat PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah/provinsi dalam suatu periode tertentu seharusnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah tersebut berbanding terbalik dengan PDRB per kapitanya namun tidak demikian yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, karena tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih tinggi dibanding tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Kenyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Persentase Jumlah Penduduk Miskin
di Pulau Jawa Berdasarkan Provinsi
Tahun 2006-2009 (Persen)

Provinsi	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
Yogyakarta	19,15	18,99	18,32	17,23	18,42
DKI Jakarta	4,57	4,61	4,29	3,62	4,27
Jawa Timur	21,09	19,98	18,51	16,68	19,07
Jawa Tengah	22,19	20,43	19,23	17,72	19,89
Jawa Barat	14,49	13,55	13,01	11,96	13,25
Banten	9,79	9,07	8,15	7,64	8,67

Sumber: Statistik Indonesia, 2006-2009

Berdasarkan Tabel 1.2 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah periode tahun 2006-2009 mengalami trend yang cenderung menurun dengan rata-rata 19,89% yang merupakan persentase jumlah penduduk miskin terbesar di Pulau Jawa. Pada tahun 2007 persentase jumlah penduduk miskin menurun sebesar 7,93% dan pada tahun 2008 persentase jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sebesar 5,87%. Kemudian pada tahun 2009 persentase jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sebesar 7,85%.

1.2 Rumusan Masalah

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi berkurangnya penduduk miskin. Pertama, pengelolaan dana zakat, dengan pengelolaan yang baik akan berguna bagi kepentingan ekonomi dan pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan pendayagunaan dana ZIS yang disalurkan kepada *mustahik* (penerima zakat) dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Mengingat PDRB per kapita merupakan gambaran bagi kesejahteraan penduduk di suatu wilayah maka dengan PDRB per kapita yang tinggi maka

mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula. Dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah maka bisa dipastikan bahwa tingkat kemiskinan juga akan semakin menurun.

Kenaikan yang terus meningkat pada pendayaagunaan dana ZIS serta PDRB per kapita dalam kurun waktu empat tahun, yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2009, seharusnya dengan kenaikan tersebut dapat membawa dampak pada penurunan jumlah penduduk miskin. Namun kenyataan yang terjadi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih tinggi dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi untuk pulau Jawa. Masih tinginya angka kemiskinan di Jawa Tengah merupakan masalah pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Pengaruh Realisasi pendayagunaan dana ZIS dan PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah merupakan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Merujuk pada permasalahan dalam penelitian ini, maka pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pendayagunaan dana ZIS terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh realisasi pendayagunaan dana ZIS terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kontribusi pendayagunaan dana ZIS dan PDRB per kapita di Kabupaten/Kota Jawa Tengah terhadap jumlah penduduk miskin.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi lembaga-lembaga terkait dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan jumlah penduduk miskin.
3. Referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan pendayagunaan dana ZIS, PDRB per kapita dan jumlah penduduk miskin.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan latar belakang penelitian yang terdiri latar belakang masalah, identifikasi masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II Landasan Teori yang akan digunakan untuk melandasi hipotesis yang diajukan memuat teori-teori yang terkait dengan zakat, anggaran pengeluaran pemerintah, PDRB dan kemiskinan di Jawa Tengah.

3. Bab III Metode Penelitian yang meliputi langkah-langkah sistematis dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini terdiri dari variabel penelitian, data dan sumber data, teknik dan model yang digunakan.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai hasil penelitian, yaitu data yang diperoleh akan di tulis dan di analisis untuk membuktikan kebenaran hipotesis.
5. Bab V Penutup yang memuat simpulan dan saran bagi pengembangan lebih lanjut hasil penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

2.1.1 Kemiskinan

Bank Dunia (2006) mendefinisikan kemiskinan adalah keadaan kelaparan, kurang tempat tinggal, kurang sandang, dan kurang pendidikan. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang masuk dalam kategori miskin, diantaranya:

- a. Rendahnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pakain, kesehatan dan pendidikan.
- b. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi dan masyarakat.
- c. Rentan terhadap guncangan ekonomi.

Hampir setiap negara, kemiskinan selalu terpusat di tempat-tempat tertentu, yaitu biasanya di pedesaan atau di daerah-daerah yang kekurangan sumber daya. Persoalan kemiskinan juga selalu berkaitan dengan masalah-masalah lain, misalnya lingkungan.

Menurut Friedman, kemiskinan sebagai minimnya kebutuhan dasar sebagaimana yang dirumuskan dalam konferensi ILO tahun 1976. Kebutuhan dasar menurut konferensi tersebut dirumuskan sebagai berikut (Fenny, 2008):

- a. Kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi *privat* (pangan, sandang, papan dan sebagainya).
- b. Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, angkutan umum, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan).
- c. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka.
- d. Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang lebih luas dari hak-hak dasar manusia.
- e. Penciptaan lapangan kerja baik sebagai alat maupun tujuan dari strategi kebutuhan dasar.

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a) Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b) Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

- c) Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d) Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
2. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

2.1.1.1 Penyebab Kemiskinan

Ditinjau dari sumber penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan kultural biasanya dicirikan oleh sikap individu atau kelompok masyarakat yang merasa tidak miskin meskipun jika diukur berdasarkan garis kemiskinan termasuk dalam kelompok miskin. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan kepemilikan, kemampuan,

pendapatan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang, maupun karena distribusi pembangunan yang hasilnya tidak merata. Kemiskinan struktural biasanya dicirikan oleh struktur masyarakat yang timpang terutama dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Kondisi kemiskinan setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: *Pertama*, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan berdampak pada keterbatasan dalam pengembangan diri dan mobilitas. Hal ini berpengaruh terhadap daya kompetisi dalam merebut atau memasuki dunia kerja. *Kedua*, rendahnya derajat kesehatan dan gizi berdampak pada rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan selanjutnya akan mengurangi inisiatif.

Ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan semakin memperburuk kemiskinan. Dengan bekerja setidaknya membuka kesempatan untuk mengubah nasibnya. *Keempat*, kondisi terisolasi (terpencil) mengakibatkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tidak dapat menjangkaunya. *Kelima*, ketidakstabilan politik berdampak pada ketidakberhasilan kebijakan pro-poor. Berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan akan mengalami kesulitan dalam implementasinya jika tidak didukung oleh kondisi politik yang stabil.

Menurut Robert Chamber (2004) dalam Departemen Komunikasi dan Informatika (2008) inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, *deprivation trap* terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan.

Kelima unsur ini seringkali saling berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi penyebab perangkap kemiskinan yang mematikan peluang hidup seseorang sehingga kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian yang utama.

Kerentanan dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu untuk menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen, atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga. Kerentanan ini sering menimbulkan *poverty rackets* atau roda penggerak kemiskinan yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan asset produksinya menjadi makin rentan dan tidak berdaya.

Banyak pemikiran dan gagasan yang diberikan oleh pakar dan pemerhati kemiskinan yang menawarkan jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan dalam bentuk suatu kebijakan. Adapun kebijakan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kebijakan mikro (*direct policy approach*) sebagai berikut (Zulkifli Husein dalam Amidi, 2008):

a) Kebijakan untuk petani

Bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan (*land-less labor*) maka diperlukan kebijakan mikro dalam bentuk pembagian asset baik berupa lahan maupun alat-alat produksi. Menurut Masbar dalam Amidi (2008), untuk kelompok ini diperlukan program pemabangunan yang mendesak (*instant development*). Dengan pembagian asset berupa lahan, kelompok ini akan mampu untuk memenuhi tingkat hidup yang lebih layak dan tingkat ketergantungan kepada upah menjadi berkurang. Selain untuk

petani yang tidak memiliki lahan pertanian, kebijakan ini juga diperlukan bagi petani yang memiliki lahan relatif kecil.

b) Kebijakan untuk pedagang kakilima dan asongan

Peningkatan taraf hidup pedagang kakilima dan asongan dapat dilakukan dengan pemberian permodalan.

c) Kebijaksanaan untuk pengrajin kecil di pedesaan

Pada kelompok ini, selain diperlukannya permodalan juga dibutuhkan pembinaan keterampilan serta pemasaran hasil produksinya. Dengan adanya kegiatan ini akan dapat meningkatkan usaha yang sekaligus akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

d) Kebijaksanaan untuk pengangguran

Penciptaan lapangan kerja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijaksanaan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin. Dalam hal ini orientasi pembangunan secara menyeluruh diupayakan lebih bersifat padat karya serta menerapkan teknologi tepat guna.

e) Kebijaksanaan untuk nelayan

Program peningkatan taraf hidup nelayan dapat dilakukan dengan pemberian modal dan peningkatan teknologi serta keterampilan.

f) Kebijaksanaan untuk gelandangan

Kebijaksanaan yang dapat dilaksanakan untuk gelandangan adalah dengan membangun rumah-rumah sederhana dengan perkreditan yang murah.

Todaro (2006), menyatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung dari dua faktor utama, yakni: *pertama*, tingkat pendapatan

nasional rata-rata. *Kedua*, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Selain itu Todaro juga menjelaskan bahwa adanya variasi kemiskinan di setiap wilayah karena disebabkan: 1) perbedaan geografis, penduduk dan pendapatan; 2) perbedaan sejarah; 3) perbedaan kekayaan SDA dan kualitas SDM; 4) perbedaan sektor swasta dan negara; 5) perbedaan struktur perindustrian; 6) perbedaan pada ketergantungan kekuatan ekonomi dan politik dari negara lain; 7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

2.1.1.2 Ukuran kemiskinan

Menurut BPS (Biro Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah konsumsi rupiah berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur kemiskinan berdasarkan dua kriteria yaitu (Suryawati, 2005):

1. Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit.
2. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telur/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter per segi per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan.

Ukuran kemiskinan menurut *Foster-Greer-Thorbecke* dalam (Todaro, 2006)

adalah:

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

Dimana:

$$a = 0, 1, 2$$

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

n = Jumlah penduduk

Jika:

1. $a = 0$, maka diperoleh *Head Count Index* ($0 P$), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.
2. $a = 1$, maka diperoleh *Poverty Gap Index* ($1 P$), yaitu indeks kedalaman kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indek, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. $a = 2$, maka diperoleh *Poverty Severity* ($2 P$), yaitu indeks keparahan kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indek, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Menurut Sadono Sukirno (2004), perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Faktor pendorong karena, *pertama*, memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja. *Kedua*, perluasan pasar, karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas, dan akan terdapat banyak pengangguran.

Dalam kaitannya dengan kemiskinan, jumlah penduduk yang besar justru akan memperparah tingkat kemiskinan. Fakta menunjukkan, di kebanyakan negara dengan jumlah penduduk yang besar tingkat kemiskinannya juga lebih besar jika dibandingkan dengan negara dengan jumlah penduduk sedikit. Banyak

teori dan pendapat para ahli yang meyakini adanya hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan kemiskinan. Salah satunya adalah Thomas Robert Malthus (1798) dalam Todaro (2006) meyakini jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti sumber daya alam akan habis. Sehingga muncul wabah penyakit, kelaparan dan berbagai macam penderitaan manusia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Wahyuniarti (2007), semakin banyak jumlah penduduk maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk, seperti dengan melakukan program Keluarga Berencana (KB).

2.1.2 Zakat Sebagai Alat Pengentas Kemiskinan

Zakat merupakan ibadah yang dapat diartikan banyak hal, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi (bahasa) kata “zakat” diambil dari kata (*az-zakah*), sedang lafal (*az-zakah*) berarti tumbuh, baik, suci dan berkah.

Menurut Departemen Agama RI (2009) zakat adalah harta wajib yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang

memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri. Dan zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam al-Quran terdapat 32 ayat zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam (Qadir, 2001).

Dalam sejarah perkembangan dunia Islam, zakat merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting, selain itu zakat juga merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu yang miskin, sehingga kemiskinan dan kemelaratan dapat terhapuskan dari masyarakat. Dalam Islam penghidupan orang-orang fakir mendapat jaminan dari berbagai segi, yaitu jaminan atas individu dengan dirinya sendiri, dengan keluarga dekat, dengan masyarakat dan antara umat dengan umat yang lainnya.

Dengan adanya zakat, bukan berarti kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dapat hilang begitu saja, karena zakat hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian, zakat merupakan penopang dan tambahan bagi pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan kemiskinan.

Pada masa *kekhalifahan* (kepemimpinan) Umar bin Khatab dana zakat yang diperoleh sebagian dimasukkan ke sisi pengeluaran untuk membiayai dana

pensiun bagi penduduk yang bergabung dalam kemiliteran dan kepegawaian seperti pegawai sipil.

Kewajiban menunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak itu, karena di dalam ajaran Islam keberadaan zakat mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan *muzakki*, *mustahik*, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut, antara lain adalah (Hafidhuddin, 2002):

Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki (QS. 9:103, QS. 30:39, QS. 14:7). *Kedua*, karena zakat merupakan hak bagi *mustahik*, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan *hasad* yang mungkin timbul dari kalangan fakir miskin ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat sesungguhnya bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada kaum miskin, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab yang menjadikan kehidupan fakir miskin menderita.

Ketiga, sebagai pilar jama'i antara kelompok aghniaya yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di

jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya (QS. 2 : 273).

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi, dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang *bathil*. Terakhir, yaitu *keenam*, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Menurut Manan (1997) zakat sebagai salah satu kebijakan fiskal yang menjadi sendi utama dari sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas kekayaan yang berimbang dengan menempatkan nilai-nilai spiritual pada tingkat yang sama, karena zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik yang memiliki ikatan ketakwaan seseorang.

Zakat sebagai kebijakan fiskal dalam Islam memiliki tujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (*al-hajat al-asasiyah/basic needs*) per individu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya (*al-hajat al-kamaliyah*) sesuai kadar kemampuannya.

Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer yaitu meliputi: *pertama*, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi tiap-tiap individu seperti jaminan akan sandang, pangan, papan dan termasuk jaminan bagi individu yang mempunyai penghasilan, tetapi tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kebutuhan-kebutuhan pokok terhadap diri dan keluarganya. Selain itu jaminan juga diberikan kepada setiap individu yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah terhadap diri sendiri maupun keluarganya.

Kedua, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi masyarakat secara keseluruhan seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan. Keamanan berfungsi melindungi dan mengayomi aktivitas perekonomian masyarakat sehingga kegiatan ekonomi menjadi lancar. Pendidikan merupakan pilar yang melahirkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sedangkan kesehatan merupakan unsur yang sangat mempengaruhi kinerja seseorang.

2.1.2.1 Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah)

Zakat mempunyai dua fungsi, yaitu *pertama* untuk membersihkan harta benda dan jiwa (fitrah) manusia. Seseorang yang telah mengeluarkan sebagian hartanya diberikan kepada *mustahik*, berarti seseorang tersebut telah mensucikan harta dan jiwanya, dan sekaligus telah mensyariatkan ibadah.

Kedua, zakat berfungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama sebagai jembatan antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian dana zakat mempunyai dimensi *hablum minAllah wa hablum minannas*, zakat dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah

sosial yang selalu ada dalam kehidupan suatu masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat hidup sebagian masyarakat (*mustahik*), agar tidak terjadi kepincangan sosial.

Fungsi zakat sebagai amal ibadah dan sebagai konsep sosial memiliki empat bentuk pendayagunaan, yaitu (Departemen Agama RI, 2009):

1. Konsumtif Tradisional yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal (harta) yang dibagikan secara langsung.
2. Konsumtif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, misalnya seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya.
3. Produktif Tradisional yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, kerbau, sapi alat cukur, pertukangan, mesin jahit, dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
4. Produktif Kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk permodalan proyek sosial atau untuk membantu atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil.

Masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia adalah kebodohan, kemiskinan dan pengangguran. Agama Islam yang memiliki konsep sosial dengan adanya ajaran zakat diharapkan dapat ikut

membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi suatu bangsa. Dengan demikian zakat untuk fakir miskin seharusnya tidak dibagikan secara keseluruhan, hal ini bertujuan supaya dana zakat dapat dijadikan suatu proyek usaha yang tujuannya untuk mengurangi kemiskinan, memberikan lapangan pekerjaan dan dapat memberikan kesempatan belajar untuk mencerdaskan bangsa.

Adapun golongan yang berhak menerima zakat seperti yang tercantum dalam surat at-Taubah : 60 yaitu terdiri dari delapan *asnaf* (golongan):

1. Fakir yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan guna mencukupi kebutuhan hidup, dan tidak pula ada yang menanggung kebutuhan hidupnya.
2. Miskin yaitu orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun memiliki pekerjaan dan usaha tetap, dan tidak pula ada yang menanggung kebutuhannya.
3. Amil yaitu panitia yang mengurus zakat, baik yang mengumpulkan, membagi, atau yang mengelola.
4. Muallaf yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam.
5. Riqab (Hamba Sahaya) yaitu orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
6. Gharim yaitu orang yang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu untuk melunasinya.

7. Sabilillah yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar Islam seperti membela/mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
8. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam berpergian dengan maksud baik.

Pendayagunaan dana ZIS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau Badan Amil Zakat (BAZ) yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Tujuan pendayagunaan dana zakat antara lain digunakan untuk beberapa kegiatan sosial, diantaranya:

1. Memperbaiki taraf hidup masyarakat

Tujuan pendayagunaan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup rakyat. Masih banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan yang mengakibatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak tidak dapat terpenuhi. Untuk menanggulangi masalah tersebut ada dua macam cara yang dapat dilakukan. *Pertama*, dengan memberikan pengetahuan tentang manajemen (dalam arti sederhana), bimbingan, dengan memberikan pengetahuan tentang beberapa macam "*home Industry*" dan lain-lain. *Kedua*, kegiatan yang bersifat memberikan permodalan, baik berupa uang sebagai modal utama, maupun modal tambahan berupa barang seperti peralatan pertanian ataupun ternak.

2. Mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran

Dalam usaha memerangi kemiskinan usaha yang dapat dilakukan yaitu diantaranya: 1) melakukan kegiatan yang sifatnya memberikan motivasi

untuk berwiraswasta dengan memberikan pengetahuan berbagai macam keterampilan, seperti menjahit, pertukangan dan lain-lain. 2) memberikan penyuluhan mengenai berniaga, dengan meberikan pengetahuan tentang usaha dagang. 3) memberikan permodalan, sebagai tindak lanjut dari dua kegiatan sebelumnya. Adapun sasaran dari kegiatan tersebut adalah masyarakat yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Perkoperasian

Kesulitan dalam mendapatkan modal merupakan masalah yang dihadapi sebagian besar penduduk Indonesia dalam mengembangkan usaha. Dengan adanya pendayagunaan zakat yang diarahkan dalam bentuk perkoperasian dapat membantu meningkatkan taraf hidup rakyat dalam memasarkan produk-produk pertanian, jasa dan lain-lain.

4. Pendidikan dan beasiswa

Masalah yang masih dihadapi masyarakat adalah mengenai tingkat kehidupan sosial yang masih rendah jauh dari garis kecukupan, sehingga mengakibatkan banyak keluarga yang tidak mampu membayar biaya sekolah anak. Dengan pendayagunaan dana zakat masalah tersebut dapat ditanggulangi dengan melakukan dua program, yaitu: 1) memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan. 2) memberikan bantuan sekolah kepada anak-anak yang kurang mampu, sehingga dapat melanjutkan sekolah samapai ke jenjang yang telah ditentukan pemerintah.

5. Proyek kesehatan

Salah satu program kemasyarakatan yang dapat ditanggulangi melalui program pendayagunaan zakat, adalah masalah pelayanan bagi masyarakat di pedesaan. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah mendirikan poliklinik, selain itu kegiatan lain seperti membantu keluarga miskin yang menderita sakit melalui Program Dana Sehat (PDS).

6. Panti asuhan

Keikutsertaan umat Islam dalam menangani pemeliharaan anak yatim piatu adalah dalam bentuk mendirikan panti asuhan untuk dapat menampung anak yatim piatu dalam jumlah yang banyak.

7. Sarana peribadatan

Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah dilakukan melalui pembangunan atau pendirian tempat ibadah atau dengan melakukan rehabilitasi tempat ibadah yang memerlukan perbaikan.

Karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan oleh agama dalam pembentukan modal, sehingga zakat memiliki peran dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Miftah (2008) dalam konteks ini, pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, tetapi juga berasal dari sumbangan wajib orang kaya yang menyisikan sebagian kecil harta kekayaannya (zakat). Karena zakat berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana, dengan demikian

akan berdampak terhadap produktifitas yang tinggi, pendapatan riil yang tinggi, tabungan dan insentif yang tinggi, dan berakhir pada terpenuhinya modal.

2.1.2.2 Objek Zakat

Menurut Departemen Agama RI (2009), adapun kekayaan yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib bagi muslim laki-laki atau perempuan, tua, muda, anak-anak maupun budak belian yang memiliki kelebihan dari nafkah keluarga pada hari dan malam Idul Fitri. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada bulan *sya'ban* (bulan ke delapan dalam kalender Islam) yang dibayar dengan uang atau beras sebesar 3,5 liter.

2) Jenis Kekayaan (Zakat Mal)

a. Emas, Perak dan Simpanan

Dasar hukum wajib emas, perak dan simpanan tertulis dalam al-Quran surat at-Taubah : 34-35. Emas, perak dan simpanan dikenakan zakat jika telah cukup *Haul* (telah disimpan selama satu tahun) dan nisabnya (jika jumlahnya telah melebihi 94 gram emas) dengan zakat sebesar 2,5%.

b. Harta Dagangan

Syarat wajib zakat dagangan adalah ketika jumlah nilai keuntungan perdagangannya mencapai 20 Dinar atau sebesar nisab emas. Adapun jumlah yang dikeluarkan untuk zakat dagangan adalah sama dengan

zakat harta kekayaan, sebesar 2,5%. Dan dasar hukum wajib zakat dagangan adalah al-Quran surat al-Baqarah : 267.

c. Hasil Bumi

Zakat hasil bumi tanpa memiliki syarat haul, karena zakat tersebut harus dikeluarkan setiap kali panen. Untuk kadar zakatnya ada dua ketentuan, yaitu: *pertama*, jika menggunakan pengairan atas jerih payah penanam, maka zakatnya sebesar 5%. *Kedua*, jika pengairannya dengan menggunakan air hujan, air sungai, air irigasi yang semuanya itu didapat dengan tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya adalah sebesar 10%.

d. Binatang Ternak

Binatang ternak di Indonesia yang dikenakan zakat ialah sapi, kerbau, dan kambing. Adapun nisabnya adalah sebagai berikut:

1. Kambing

Mulai dikenakan nisab setelah ada sejumlah 40 ekor. Dari jumlah 40 sampai dengan 120 ekor zakatnya sebesar satu ekor kambing. Dari jumlah 121 sampai dengan 200 ekor, zakatnya dua ekor kambing. Dari jumlah 201 sampai dengan 300 ekor, zakatnya sebesar tiga ekor kambing. Selanjutnya, setiap kelipatan 100 ekor zakatnya ditambah dengan satu ekor kambing.

2. Sapi dan Kerbau

Sapi dan kerbau mulai dikenakan zakat setelah berjumlah 30 ekor sapi/kerbau. Dari jumlah 30 sampai dengan 39 ekor, zakatnya

seekor sapi/kerbau yang telah berumur lebih dari satu tahun. Dari jumlah 40 sampai dengan 49 ekor sapi/kerbau, zakatnya sebesar satu ekor sapi yang telah berumur lebih dari dua tahun. Dari jumlah 60 sampai dengan 69 ekor sapi/kerbau, zakatnya sebesar dua ekor sapi/kerbau yang telah berumur lebih dari satu tahun. Dari jumlah 70 sampai dengan 79 ekor sapi/kerbau, zakatnya sebesar dua ekor sapi, seekor berumur lebih dari satu tahun dan seekor lagi berumur lebih dari dua tahun.

3) Zakat Koperasi

Sekelompok masyarakat yang mendirikan usaha dengan jalan mengumpulkan modal secara bersama untuk mendirikan suatu usaha. Jika harta usaha tersebut telah cukup nisab dan telah berjalan lebih dari satu tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya meskipun seandainya modal tersebut dipecah-pecah per anggota seharusnya belum cukup untuk mengeluarkan zakat, namun karena modal tersebut dikumpulkan menjadi satu kesatuan, maka modal tersebut secara keseluruhan harus dikeluarkan zakatnya.

4) Zakat Rikaz

Rikaz adalah benda kuno yang ditemukan. Zakat rikaz dikeluarkan oleh penemu benda kuno yang telah mendapat imbalan atas temuannya tersebut. Zakat untuk barang rikaz adalah sebesar seperlima dari harga barang tersebut.

5) Zakat Hasil Laut

Imam Ahmad berpendapat bahwa barang yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara dan lain-lain dikenakan zakat apabila jumlah harganya sama dengan harga hasil bumi (nisab zakat hasil laut sama dengan zakat hasil bumi).

2.1.2.3 Syarat dan Rukun Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, dan merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam. Zakat diwajibkan pada bulan syawal tahun kedua hijriyah sesudah puasa Ramadhan. Diantara syarat wajib zakat bagi seorang *muzakki* adalah :

1. Merdeka

Menurut Jumhur (mayoritas Ulama), zakat diwajibkan atas tuan (majikan) karena majikanlah yang memiliki harta hambanya (budak). Seorang hamba sahaya tidak diwajibkan zakat karena harta yang dimilikinya tidak sempurna (*naqish*) atau tidak dimiliki secara penuh. Begitu juga Mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan dari tuannya dengan jalan ditebus) tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat.

2. Baligh dan Berakal

Menurut madzhab Hanafi zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti salat dan puasa.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah/provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi seluruh wilayah.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

Dalam menghitung angka-angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan tiga pendekatan, yaitu:

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah (region) dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi sembilan sektor lapangan usaha, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran,

pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam pengertian Produk Domestik Regional Bruto, kecuali faktor pendapatan di atas, termasuk pula komponen penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto. Semua komponen pendapatan ini secara sektoral disebut Nilai Tambah Bruto, sehingga Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai penjumlahan pada nilai tambah dari seluruh sektor (lapangan usaha).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

2.1.3.1 Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Kemiskinan

Pendapatan per kapita seringkali digunakan sebagai indikator pembangunan karena pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan

ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara daripada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik bruto per kapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PRDB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata. Menurut Arsyad (1999), pendapatan per kapita seringkali digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Tingginya penerimaan daerah, diharapkan nantinya pemerintah daerah tersebut dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan baik. Tingginya tingkat pendapatan daerah bisa disebabkan karena berbagai perubahan mendasar, seperti struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional.

Seluruh negara di dunia telah sepakat bahwa produk nasional bruto per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Semakin tinggi produk nasional bruto per kapita semakin makmur negara yang bersangkutan. Prasyarat peningkatan kesejahteraan suatu bangsa adalah pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pelestarian fungsi lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dan PNB (PDRB pada suatu wilayah/provinsi) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk.

Bank Dunia menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB), bukan PDB sebagai alat ukur perkembangan ekonomi suatu negara, yaitu dengan tidak memperhitungkan pendapatan bersih dan faktor produksi milik orang asing. Walaupun PDB atau PNB per kapita merupakan alat pengukur yang lebih baik, namun tetap belum mencerminkan kesejahteraan penduduk secara tepat, karena PDB rata-rata tidak mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang sesungguhnya dirasakan oleh setiap orang di suatu negara. Oleh sebab itu, unsur distribusi pendapatan di antara penduduk suatu negara perlu diperhatikan. Karena dengan PDB atau PNB per kapita yang meningkat disertai distribusi pendapatan yang lebih merata akan mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan per kapita yang besar namun distribusi pendapatannya tidak merata.

2.1.3.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan

Pembangunan merupakan proses yang multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2006).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. Karena permasalahan kemiskinan tidak terpecahkan jika hanya mengharapkan terjadinya *trickle down effect* (efek menetes ke bawah) (Siregar dan Wahyuniarti, 200).

Hal ini terbukti dalam penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Syarul (2009) dalam thesisnya melakukan penelitian “Pengaruh Anggaran Pengeluaran Pemerintah Pendayagunaan Dana ZIS, dan PDRB per Kapita Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus DKI Jakarta)”, menggunakan metode analisis regresi berganda dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2002. Model yang digunakan adalah $TM: \alpha + \beta_1 KESRA + \beta_2 ZIS + \beta_3 PDRB + \epsilon_i$. Hasil penelitian ini adalah variabel anggaran belanja bidang kesra dan variabel pendayagunaan dana ZIS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, sedangkan variabel PDRB per kapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

Alawi (2006), melakukan penelitian mengenai “Anggaran Pengeluaran Pembangunan Daerah”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indeks kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, persamaan dalam penelitian ini adalah $P_{jit} = f(PPE_{i(t-1)} + PPM_{i(t-1)} + PJS_{i(t-1)}, KER_{it}, PEND_{it}, KES_{it})$.

Temuan utama penelitian ini adalah terdapat pengaruh terhadap ketiga ukuran kemiskinan, yaitu tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan di Jawa Tengah dari ketiga variabel pengeluaran yang digunakan.

Prasetyo (2010) melakukan penelitian mengenai “Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan”. Model yang digunakan adalah $K_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Y_{it} + \alpha_2 U_{it} + \alpha_3 PD_{it} + \alpha_4 P_{it} + \mu_{it}$. Hasil uji F-statistik dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independent yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan dalam model regresi secara bersama-sama mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan.

Beik (2010) dalam Jurnal Ekonomi Islam Republika meneliti mengenai “Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan”. Alat analisa yang digunakan adalah rasio gini dan kurva Lorenz.. Hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya perbaikan distribusi pendapatan mustahik pasca zakat, dan dari sisi kesenjangan pendapatan kurva Lorenz pasca zakat menunjukkan adanya pergeseran menuju garis equilibrium, bila dibanding kurva Lorenz pra zakat.

Widiastuti (2010) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2008”. Model dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: $KM = f(GRW, JP, AMH, DF)$,

Hasil penelitian ini adalah bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan mengurangi kemiskinan. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal di suatu wilayah maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Dengan demikian semua variabel dependent digunakan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Tujuan	Data	Metode Penelitian	Hasil Empiris
1	Ujang Syahrul M (2009), "Pengaruh Anggaran Pengeluaran Pemerintah, Pendayagunaan Dana ZIS dan PDRB Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan. (Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 1987-2002)".	Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh anggaran penegeluaran pemerintah bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan	Data time series tahun 1987-2002 yang diperoleh dari BPS dan BAZIS DKI Jakarta	Analisis ekonometrika regresi berganda, dengan model $TM = \alpha + \beta_1 \text{Kesra} + \beta_2 \text{ZIS} + \beta_3 \text{PDRB} + \varepsilon_i$	Anggaran bidang kesra mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan
2	Nadhif Alawi (2006), "Pengaruh Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2004)".	Apakah secara statistik terbukti ada kaitan signifikan antara kemiskinan dan anggaran belanja pembangunan suatu daerah	Panel Data 35 kabupaten/kota yang diperoleh dari BPS	Persamaan regresi data panel berdasarkan persamaan: $Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + \mu_{it}$	terdapat pengaruh terhadap ketiga ukuran kemiskinan, yaitu tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan di Jawa Tengah dari ketiga variabel pengeluaran yang digunakan.

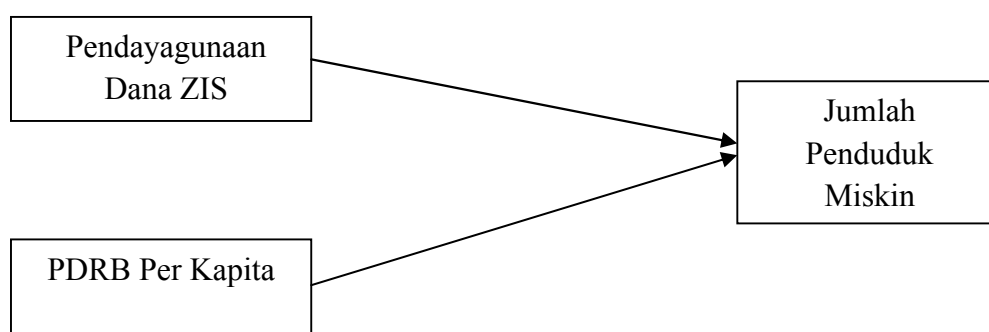
3	Dr.Irfan Syauqi Belk (2010), “Peran Zakat Mengentaskan Keemiskinan dan Kesenjangan”	Untuk mengukur dampak zakat terhadap penurunan jumlah rumah tangga miskin (<i>mustahik</i>).	Data Primer dengan sampel 1.195 rumah tangga zakat di DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Headcount Index (H) Rasio Poverty Gap (P_1) dan Income Gap (I) untuk mengukur tingkat kedalaman rumah tangga miskin. Indeks Sen dan 2. Indeks FGT (Foster, Greer, dan Thorbecke) (P_2) digunakan untuk mengukur dampak zakat terhadap tingkat keparahan rumah tangga miskin. 3. Kurva Lorenz 	<i>Pertama</i> , Adanya perbaikan distribusi pendapatan mustahik pasca zakat. <i>Kedua</i> , dari sisi kesenjangan pendapatan, kurva Lorenz pasca zakat menunjukkan garis equilibrium bila dibanding kurva Lorenz pra zakat.
4	Agus (2010), “Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan”.	Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan.	Panel Data, data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2003-2007	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (<i>fixed effect model</i>). Dengan persamaan data panel $Y_{it} = \beta_0 + \beta_2 X_{it} + \mu_{it}$	Penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independent yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan dalam model regresi secara bersama-sama mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan

5	Ari Widiastuti, (2010) "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2008".	Pertama, mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Kedua, mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Ketiga, mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Keempat, mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.	Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan analisis panel data, yang terdiri dari data <i>time series</i> selama periode 2004-2008 dan data <i>cross section</i> 35 kabupaten/kota Jawa Tengah.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (<i>fixed effect model</i>). Model yang digunakan adalah $KMit = \beta_0 + \beta_1 GRWit + \beta_2 JPit + \beta_3 5MHit + \beta_4 DFit + \epsilon it$ dimana KM adalah kemiskinan (jumlah penduduk miskin), GRW adalah pertumbuhan ekonomi, JP adalah jumlah penduduk, AMH adalah Angka Melek Huruf, DF adalah desentralisasi fiskal	Semua variabel dependent gunakan, yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, Angka Melek Huruf, dan desentralisasi fiskal dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
---	--	---	--	--	---

2.1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan, serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut adalah gambar kerangka pemikiran yang skematis:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.1.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga pendayagunaan dana ZIS berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan tiga variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan yaitu jumlah penduduk miskin. Sedangkan tiga variabel independen yang digunakan antara lain: Realisasi Pendayagunaan Dana ZIS, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

3.1.2 Definisi Operasional

1. Jumlah Penduduk Miskin

Menurut BPS (2007), Jumlah penduduk miskin adalah jumlah keseluruhan populasi dengan pengeluaran per kapita tertentu yang berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita (dua puluh ribu rupiah per hari) untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Satuan dari variabel jumlah penduduk miskin adalah dalam jiwa.

2. Realisasi Pendayagunaan Dana ZIS

Merupakan pemberian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang telah terkumpul di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Jawa Tengah

dan dikeluarkan dalam bentuk pendayagunaan dana seperti beasiswa. Adapun bentuk pendayagunaan dana ZIS dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, Konsumtif Tradisional yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* secara langsung, seperti zakat fitrah. *Kedua*, Konsumtif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, misalnya seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya. *Ketiga*, Produktif Tradisional yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing. *Keempat*, Produktif Kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk permodalan proyek sosial atau untuk membantu atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil. Satuan dari variabel pendayagunaan dana ZIS adalah dalam satuan ribu rupiah.

3. PDRB per Kapita

Produk domestik bruto per kapita adalah jumlah PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang bersangkutan. Satuan variabel PDRB per kapita dalam penelitian ini adalah dalam rupiah.

3.2 Populasi dan Sampel

Penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling, karena data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan, seperti buku-buku literatur, catatan-catatan atau sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber antara lain:

1. Jumlah Penduduk Miskin

Diperoleh dari data Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2006, 2007, 2008, 2009, yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

2. PDRB per Kapita

Diperoleh dari data PDRB per Kapita Jawa Tengah tahun 2006, 2007, 2008, 2009 yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

3. Realisasi Pendayagunaan Dana ZIS

Diperoleh dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Jawa Tengah tahun 2006, 2007, 2008, 2009.

Data panel (*pooling* data) atau data longituginal merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data panel adalah penggabungan dari jenis data *cross section* dan data *time series* sebanyak 35 data kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009. Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

$$i = 1, 2, \dots N, t = 1, 2, \dots T$$

Dimana:

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

$N \times T$ = banyaknya data panel

Menurut Gujarati (2003) keuntungan menggunakan data panel yaitu:

- 1) Mengingat penggunaan data panel juga meliputi data *cross section* dalam rentang waktu tertentu, maka data panel akan memperhitungkan secara eksplisit heterogenitas tersebut.
- 2) Dengan pengkombinasian, data akan memberikan informasi yang lebih baik, tingkat kolinearitas yang lebih kecil antar variabel dan lebih efisien.
- 3) Penggunaan data panel mampu meminimalisasi bias yang dihasilkan jika kita meregresikan data individu ke dalam agregasi yang luas.

Dalam data panel, hilangnya suatu variabel akan tetap menggambarkan perubahan lainnya akibat penggunaan data time series. Selain itu, penggunaan data yang tidak lengkap (*unbalanced data*) tidak akan mengurangi ketajaman estimasi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui pendalaman literatur-literatur yang berkaitan dengan objek studi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek studi.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Metode Analisis Data Panel

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi data yang dapat diukur, diuji, dan diinformasikan dalam bentuk persamaan, tabel, dan sebagainya (Marzuki, 2005).

Selain Gujarati (2003), Cheng Hsiao (2003) juga mengemukakan beberapa keuntungan dari penggunaan data panel, yaitu: 1) memberikan jumlah observasi yang lebih banyak dari tiap individu; 2) data panel memberikan poin data yang lebih besar, sehingga dapat memperbesar derajat kebebasan dan mengurangi kolinearitas variabel penjelas; 3) data panel dapat digunakan untuk menganalisis sejumlah pertanyaan ekonomi yang tidak dapat dijawab dengan menggunakan data *time series* atau data *cross section*; 4) data panel memberikan cara yang lebih baik untuk menjelaskan efek dari variabel yang hilang atau tidak diobservasi; 5) data panel dapat digunakan untuk membangun dan menguji perilaku model dengan lebih kompleks dibandingkan dengan yang dapat dilakukan pada data *time series* atau *cross section*; dan 6) data panel memberikan informasi mengenai satu individu yang dicari dengan melihat perilaku individu lainnya yang memiliki kesamaan dengan individu yang dicari tersebut.

Dalam analisa data panel dikenal tiga macam pendekatan, yang terdiri dari pendekatan kuadrat terkecil (*pooled least square*), pendekatan efek tetap (*fixed*

effect), pendekatan efek acak (*random effect*). Ketiga pendekatan yang dapat dilakukan dalam analisis panel data adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Kuadrat Terkecil (*Pooled Least Square*)

Pengolahan yang paling sederhana dalam data panel adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan dalam data berbentuk *pool*. Dalam metode ini, semua diperlakukan sama tanpa membedakan unit *cross section*-nya dengan kata lain pendekatannya adalah dengan mengabaikan dimensi waktu dan ruang yang dimiliki data panel. Kemudian metode regresi OLS (*ordinary least squares*) biasa yang digunakan sebagai metode estimasinya, sehingga hanya akan menghasilkan persamaan intersep dan koefisien-koefisien variabel bebas yang sama untuk setiap unit.

2) Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Model ini sangat tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan residualnya. Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul yaitu:

- a. Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu dan perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh residual.
- b. Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu.
- c. Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu.

- d. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu
- e. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu.

Salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time-series*).

Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Squarae Dummy Variable* atau disebut juga *Covariance Model*. Dalam pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Least Squarae Dummy Variable* (LSDV), ada beberapa permasalahan yang muncul, yaitu (Firmansyah, 2009):

- a) Jika memasukkan banyak *dummy* (contoh model dengan variasi intersep antar waktu antar individu), akan mengurangi *degree of freedem* (df).
- b) Jika terlalu banyak variabel di dalam model, akan mengarah kepada terjadinya multikolinieritas.
- c) Jika menggunakan *dummy* lain selain untuk menyatakan perbedaan intersep individu dan waktu, misalnya suku, musim, jenis kelamin, dan lain-lain, akan menyulitkan mengidentifikasi besaran koefisien *dummy* perbedaan intersep.

- d) Untuk error term, karena merupakan *error cross section* dan *time series*, asumsi klasik yang diasumsikan dapat mengalami modifikasi.

Beberapa kemungkinan modifikasi terhadap asumsi *error term* adalah sebagai berikut:

- a. Dapat diasumsikan bahwa varians *error* adalah konstan untuk semua unit *cross section* atau dapat diasumsikan varians *error* adalah heteroskedastik.
- b. Untuk setiap individu dapat diasumsikan tidak terjadi autokorelasi antar waktu.
- c. Berbagai kemungkinan lain asumsi *error term*.

3) Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*)

Dalam penggunaan berbagai variasi dari model *Least Square Dummy Variable* (LSDV), meskipun mudah dan dapat langsung diterapkan, namun LSDV dianggap masih memiliki berbagai kekurangan dan permasalahan. Model panel data yang di dalamnya melibatkan korelasi antar error term karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga model efek acak (*random effect*).

Gujarati (2003) dalam Firmansyah (2009) menjelaskan bahwa estimasi model regresi dengan menggunakan data panel tergantung pada asumsi yang digunakan pada intersep, slope koefisien, dan *error term*. Kemungkinannya yaitu:

- 1) Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope (kemiringan) adalah konstan antar waktu (*time*) dan ruang (*space*) dan error term mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu (ruang).
- 2) Koefisien slope konstan tapi intersep bervariasi antar individu (wilayah).
- 3) Koefisien slope konstan tapi intersep bervariasi antar waktu
- 4) Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar waktu dan individu (wilayah)
- 5) Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu (wilayah)
- 6) Intersep konstan sebagaimana koefisien slope bervariasi antar waktu

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel. *Fixed Effect Model* (FEM) mengasumsikan bahwa: 1) persamaan regresi memiliki slope konstan sedangkan intersep bervariasi antar individual. Dalam hal ini, intersep dari masing-masing individu diasumsikan memiliki perbedaan yang disebabkan oleh karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing individu. 2) Koefisien slope dari regresor tidak bervariasi antar individu maupun antar waktu.

3.6 Estimasi Model

Data panel merupakan penggabungan dari jenis data *cross section* dan data *time series*, sehingga dalam penelitian ini terdapat 35 data kabupaten/kota di Jawa Tengah yang merupakan data *cross section* dengan menggunakan *data time series*

selama empat tahun yaitu tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009. Sehingga kombinasi atau pooling data menghasilkan 140 observasi dengan model persamaan sebagai berikut:

$$KM = f(ZIS, PDRB) \dots \dots \dots (3.2)$$

Dimana :

KM = Jumlah Penduduk Miskin

ZIS = Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

PDRB = PDRB per kapita

Model dasar (3.2) di atas diturunkan menjadi model ekonometrik sebagai berikut:

$$\text{LOGKM}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LOGZIS}_{it} + \alpha_3 \text{LOGPDRB}_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.3)$$

Penelitian ini menggunakan dummy wilayah, untuk melihat perbedaan perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama empat tahun dengan periode penelitian tahun 2006-2009. Kota Magelang sebagai wilayah acuan (*benchmark*). Alasan penggunaan Kota Magelang sebagai *benchmark* karena Kota Magelang merupakan Kota yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah di Provinsi Jawa Tengah. Setelah memasukkan variabel dummy wilayah pada model, maka persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{KM}_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{ZIS}_{it} + \alpha_3 \text{PDRB}_{it} + \gamma_1 \text{D}_1 + \gamma_2 \text{D}_2 + \gamma_3 \text{D}_3 + \gamma_4 \text{D}_4 + \gamma_5 \text{D}_5 + \gamma_6 \text{D}_6 \\ & + \gamma_7 \text{D}_7 + \gamma_8 \text{D}_8 + \gamma_9 \text{D}_9 + \gamma_{10} \text{D}_{10} + \gamma_{11} \text{D}_{11} + \gamma_{12} \text{D}_{12} + \gamma_{13} \text{D}_{13} + \gamma_{14} \text{D}_{14} + \gamma_{15} \text{D}_{15} + \\ & \gamma_{16} \text{D}_{16} + \gamma_{17} \text{D}_{17} + \gamma_{18} \text{D}_{18} + \gamma_{19} \text{D}_{19} + \gamma_{20} \text{D}_{20} + \gamma_{21} \text{D}_{21} + \gamma_{22} \text{D}_{22} + \gamma_{23} \text{D}_{23} + \\ & \gamma_{24} \text{D}_{24} + \gamma_{25} \text{D}_{25} + \gamma_{26} \text{D}_{26} + \gamma_{27} \text{D}_{27} + \gamma_{28} \text{D}_{28} + \gamma_{29} \text{D}_{29} + \gamma_{30} \text{D}_{30} + \gamma_{31} \text{D}_{31} + \\ & \gamma_{32} \text{D}_{32} + \gamma_{33} \text{D}_{33} + \gamma_{34} \text{D}_{34} \mu_{it} \dots \dots \dots (3.4) \end{aligned}$$

Dimana:

KM	= Kemiskinan
ZIS	= Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah
PDRB	= Produk domestik regional bruto per kapita harga konstan
D1	= <i>dummy</i> Kabupaten Cilacap
D2	= <i>dummy</i> Kabupaten Banyumas
D3	= <i>dummy</i> Kabupaten Purbalingga
D4	= <i>dummy</i> Kabupaten Banjarnegara
D5	= <i>dummy</i> Kabupaten Kebumen
D6	= <i>dummy</i> Kabupaten Purworejo
D7	= <i>dummy</i> Kabupaten Wonosobo
D8	= <i>dummy</i> Kabupaten Magelang
D9	= <i>dummy</i> Kabupaten Boyolali
D10	= <i>dummy</i> Kabupaten Klaten
D11	= <i>dummy</i> Kabupaten Sukoharjo
D12	= <i>dummy</i> Kabupaten Wonogiri
D13	= <i>dummy</i> Kabupaten Karang Anyar
D14	= <i>dummy</i> Kabupaten Sragen
D15	= <i>dummy</i> Kabupaten Bogor
D16	= <i>dummy</i> Kabupaten Grobogan
D17	= <i>dummy</i> Kabupaten Blora
D18	= <i>dummy</i> Kabupaten Rembang
D19	= <i>dummy</i> Kabupaten Pati

D20	= <i>dummy</i> Kabupaten Kudus
D21	= <i>dummy</i> Kabupaten Jepara
D22	= <i>dummy</i> Kabupaten Demak
D23	= <i>dummy</i> Kabupaten Semarang
D24	= <i>dummy</i> Kabupaten Temanggung
D25	= <i>dummy</i> Kabupaten Kendal
D26	= <i>dummy</i> Kabupaten Batang
D26	= <i>dummy</i> Kabupaten Pekalongan
D27	= <i>dummy</i> Kabupaten Pemasang
D28	= <i>dummy</i> Kabupaten Tegal
D29	= <i>dummy</i> Kabupaten Brebes
D30	= <i>dummy</i> Kota Magelang
D31	= <i>dummy</i> Kota Surakarta
D32	= <i>dummy</i> Kota Salatiga
D33	= <i>dummy</i> Kota Pekalongan
D34	= <i>dummy</i> Kota Tegal
α_0	= intersep
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$	= koefisien regresi variabel bebas
$\gamma_1 - \gamma_{24}$	= koefisien <i>dummy</i> wilayah
μ_{it}	= komponen error di waktu t untuk unit <i>cross-section</i> i
i	= 1, 2, 3, ..., 34 (data <i>cross-section</i> kabupaten/kota di Jawa Tengah)
t	= 1, 2, 3, 4 (data <i>time-series</i> , tahun 2006-2009)

Model persamaan tersebut akan diregres masing-masing dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model* (FEM). Untuk kemudahan dalam menghindari terjadinya masalah-masalah yang sering timbul karena terdapat perbedaan satuan diantara variabel-variabel, yaitu variabel terikat satuannya orang, sementara variabel-variabel bebas satuannya adalah nominal rupiah. Perbedaan satuan data ini akan menyulitkan dalam menginterpretasikan model yang akan terbentuk, sehingga perlu dilakukan transformasi kedalam bentuk bentuk logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural (Ghozali, 2005) adalah sebagai berikut :

- 1) Menghindari adanya heteroskedastisitas
- 2) Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas
- 3) Mendekatkan skala data

Sehingga persamaan menjadi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LOGKM}_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{LOGZIS}_{it} + \alpha_3 \text{LOGPDRB}_{it} + \gamma_1 D_1 + \gamma_2 D_2 + \gamma_3 D_3 + \gamma_4 D_4 \\ & + \gamma_5 D_5 + \gamma_6 D_6 + \gamma_7 D_7 + \gamma_8 D_8 + \gamma_9 D_9 + \gamma_{10} D_{10} + \gamma_{11} D_{11} + \gamma_{12} D_{12} + \gamma_{13} D_{13} + \\ & \gamma_{14} D_{14} + \gamma_{15} D_{15} + \gamma_{16} D_{16} + \gamma_{17} D_{17} + \gamma_{18} D_{18} + \gamma_{19} D_{19} + \gamma_{20} D_{20} + \gamma_{21} D_{21} + \\ & \gamma_{22} D_{22} + \gamma_{23} D_{23} + \gamma_{24} D_{24} + \gamma_{25} D_{25} + \gamma_{26} D_{26} + \gamma_{27} D_{27} + \gamma_{28} D_{28} + \gamma_{29} D_{29} + \\ & \gamma_{31} D_{31} + \gamma_{32} D_{32} + \gamma_{33} D_{33} + \gamma_{34} D_{34} \text{ mit} \dots \dots \dots (3.4) \end{aligned}$$

3.7 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik, jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non parametrik sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik

parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas serta data yang harus berdistribusi normal. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut :

3.7.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Tepatnya istilah multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti dan istilah kolinearitas berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linear. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen.

Menurut Gujarati (2003) untuk mengetahui terjadinya multikolinieritas dapat dideteksi melalui:

- a) Nilai R^2 tinggi (mendekati 1), tetapi tidak ada variabel bebas yang signifikan
- b) Dimana bila nilai R^2 regresi parsial masing-masing variabel bebas lebih besar dari R^2 model utama maka terjadi multikolinieritas.

Multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *auxiliary regressions* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih besar dari R^2 regresi auxiliary maka di dalam model tidak terdapat multikolinearitas.

3.7.2 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2005), uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya), dimana jika terjadi korelasi dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji *Breusch-Godfrey Test* atau Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Dari hasil uji LM apabila nilai Obs*R-squared lebih besar dari nilai χ^2 tabel dengan *probability* $\chi^2 < 5\%$ menegaskan bahwa model mengandung masalah autokorelasi. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai Obs*R-squared lebih kecil dari nilai χ^2 tabel dengan *probability* $\chi^2 > 5\%$ menegaskan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi.

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data *cross section* (Ghozali, 2005).

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan *Breusch Pagan Godfrey*. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat terkecil dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability *Obs*R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 5%. Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

3.7.4 Uji Statistik

3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Menurut Gujarati (2003) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R^2) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, R^2 menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas.

Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* (R^2) pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan formula:

$$R^2 = \frac{\sum y^{*2}}{\sum y^2} \dots\dots\dots (3.5)$$

2.7.4.2 Uji Signifikansi Simultan

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam 61 mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan:

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$
- H_1 : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol (Gujarati, 2003).

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / (K - 1)}{(1 - R^2) / (N - K)} \dots\dots\dots (3.6)$$

Dimana :

K = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila F hitung $>$ F tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.